

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD dan Pemerintah DKI Kembali Perdebatkan Tarif MRT

Pimpinan Dewan meminta harga tiket diturunkan menjadi rata-rata Rp 8.500 sekali perjalanan.

Gangsar Parikesit
gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah DKI Jakarta kembali memperdebatkan tarif *mass rapid transit* (MRT) fase I Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia. Perdebatan alot berlangsung dalam rapat pimpinan gabungan di gedung DPRD, Kebon Sirih, kemarin.

Pekan lalu, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD telah menyetujui usulan tarif tiket MRT dari pemerintah DKI, yakni rata-rata Rp 10 ribu per sepuluh kilometer perjalanan. Namun, dalam rapat pimpinan gabungan kemarin, anggota legislatif meminta harga tiket diturunkan lagi.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, yang memimpin rapat gabungan, memutuskan tarif MRT Jakarta rata-rata sebesar Rp 8.500. Kali ini, pemerintah DKI yang tak mau menerima keputusan Dewan.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah meminta Dewan tidak terburu-buru mengesahkan tarif MRT Jakarta. "Masih ada ruang eksekutif dan legislatif membicarakan ini (tarif MRT) lebih dalam," ujar dia setelah menghadiri rapat pimpinan gabungan.

Presiden Joko Widodo telah meresmikan pengoperasian angkutan massal berbasis rel itu pada Ahad lalu. Jika tarif tiket disepakati,

pada 1 April nanti, PT MRT Jakarta akan mengoperasikan kereta Ratangga secara komersial.

Menurut Saefullah, penetapan tarif MRT Jakarta itu harus diputuskan berdasarkan argumentasi yang logis. "Dengan perhitungan yang cermat dan matang untuk kepentingan masyarakat," ujar dia.

Saefullah menjelaskan bahwa usulan tarif tiket dari pemerintah DKI telah mempertimbangkan aspek kesehatan keuangan PT MRT Jakarta. Contohnya, MRT Jakarta memerlukan anggaran untuk merawat kereta serta sarana angkutan massal berbasis rel itu. "Perawatan sarana menjadi salah satu komponen dalam penyusunan tarif," ujar dia.

Penyusunan usulan tarif MRT Jakarta, kata Saefullah, juga telah mempertimbangkan saran Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Dewan Transportasi mengusulkan tarif MRT yang terintegrasi dengan Jak Lingko ialah Rp 12 ribu. Sedangkan, PT MRT Jakarta mengusulkan tarif rata-rata Ratangga sebesar Rp 8.500 dan Rp 10 ribu.

Usulan tarif dari MRT Jakarta, menurut Saefullah, juga didasari oleh *willingness to pay* atau kesediaan membayar para penumpang. Sebelumnya, PT MRT Jakarta telah menggelar survei tentang kesediaan masyarakat membayar karcis Ratangga.

Karena pemerintah DKI menolak, dalam forum

rapat pimpinan gabungan kemarin belum ada penandatanganan kesepakatan tarif MRT Jakarta. Artinya, kata Saefullah, meski telah diputuskan pimpinan DPRD, belum ada tarif MRT yang disepakati.

Prasetyo menerangkan bahwa pimpinan Dewan menetapkan tarif MRT Jakarta rata-rata Rp 8.500 karena angka itu merupakan jalan tengah antara usulan tarif dari DTKJ dan PT MRT Jakarta. Dia juga meminta pemerintah DKI Jakarta dan PT MRT Jakarta menghitung ulang komponen tarif Ratangga termasuk potensi perubahan subsidi tiketnya. "Nanti kami rapatkan (bahas) kembali," kata politikus PDI Perjuangan itu.

Menurut Prasetyo, tarif rata-rata MRT sebesar Rp 8.500 itu bisa mendorong masyarakat meninggalkan mobil pribadinya sehingga kemacetan di Ibu Kota bisa berkurang. "Kami ingin menekan pengguna mobil agar lari (pindah) ke MRT," katanya.

Senada dengan Prasetyo, Ketua Fraksi NasDem, Bestari Barus, menilai tarif MRT rata-rata Rp 10 ribu masih memberatkan warga Ibu Kota. Bestari mencontohkan, masyarakat yang sehari-hari menggunakan sepeda motor berpotensi tidak akan berpindah ke MRT jika tarif rata-ratanya Rp 10 ribu. Sebab, mobilitas dengan MRT justru akan membuat biaya transportasi melonjak beberapa kali lipat. "Saya sarankan penetapan harga

(tiket MRT) tidak lebih dari Rp 7.000," ujar dia.

Adapun Ketua Komisi Bidang Keuangan DPRD, Santoso, menyoroti subsidi untuk MRT Jakarta yang dia anggap memberatkan keuangan daerah. Santoso meminta pemerintah DKI Jakarta menghitung ulang besaran subsidi yang diperlukan untuk tiket Ratangga. "Kami juga melihat banyak *cost* MRT yang bisa dihemat agar subsidi tidak banyak," tutur politikus Partai Demokrat itu.

Sebelumnya, pemerintah DKI menjelaskan bahwa dengan tarif MRT rata-rata Rp 10 ribu saja, daerah bakal memberikan subsidi sebesar Rp 21.659 per penumpang. Dengan asumsi bahwa jumlah penumpang sebanyak 65 ribu per hari pada tahun ini, tarif keekonomian tiket Ratangga ialah Rp 31.659. Walhasil, untuk pengoperasian MRT tahun ini diperlukan subsidi sebesar Rp 572 miliar. Adapun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019 subsidi MRT telah dialokasikan sebesar Rp 672 miliar.

● JULNIS FIRMANSYAH | LANI DIANA

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DPRD dan Pemerintah DKI Kembali Perdebatkan Tarif MRT

“Masih ada ruang eksekutif dan legislatif membicarakan ini (tarif MRT) lebih dalam.”

Polemik Tarif Ratangga

PEMERINTAH DKI Jakarta dan legislator Kebon Sirih tak kunjung menyepakati tarif dan besaran subsidi untuk MRT Jakarta. Padahal, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Ratangga pada Ahad lalu dan akan beroperasi penuh per 1 April nanti. Berikut ini asumsi tarif Ratangga rata-rata sebesar Rp 10 ribu yang diajukan oleh pemerintah DKI:

Ringkasan Tarif Keekonomian

Rincian Biaya	Nilai	Keterangan
Biaya modal sarana	Rp 73,6 miliar	Biaya pengadaan sarana MRT
Biaya operasi	Rp 490,9 miliar	Biaya pengoperasian MRT
Biaya perawatan	Rp 4,4 miliar	Biaya perawatan sarana MRT
Keuntungan (10 persen)	Rp 56,9 miliar	Margin keuntungan yang dihitung dari total biaya
Total biaya	Rp 625,9 miliar	
Jumlah penumpang setahun (65 ribu per hari)	19,7 juta	Asumsi
Tarif per penumpang sekali lintas	Rp 31.659	

- Tarif usulan DTKJ Rp 12 ribu (terintegrasi dengan Jak Lingko)
- Tarif usulan MRT Jakarta Rp 8.500 dan Rp 10 ribu (rata-rata)
- Tarif usulan pemerintah DKI Rp 10 ribu (rata-rata)
- Kesanggupan masyarakat Rp 8.500- 12.500
- Subsidi per penumpang Rp 21.659
- Kebutuhan riil subsidi Rp 572 miliar
- Alokasi subsidi Rp 672 miliar (dalam APBD 2019)

SUMBER: WAWANCARA | PT MRT JAKARTA
● GANGSAR PARIKESIT